

## PERANAN GERWANI DALAM PEMBEBASAN IRIAN BARAT 1950-1963

Oleh: Dimas Dwi Kurnia, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Yogyakarta, [dimasddk123@gmail.com](mailto:dimasddk123@gmail.com)

Organisasi Gerakan Wanita Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Gerwani adalah gerakan wanita di Indonesia yang didirikan pada tahun 1950. Pada mulanya, Gerwani berasal dari Gerwis yang merupakan kependekan dari Gerakan Wanita Sedar. Dalam Kongres I Gerwis di Surabaya tahun 1951 mereka telah menyinggung masalah Irian Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Gerwani dalam perjuangan pembebasan Irian Barat tahun 1950-1963. Sejak tahun 1957, politik Gerwani banyak diarahkan ke masalah Irian Barat. Tanggal 22 Desember 1957 Gerwani ikut menandatangani Piagam BKSPM (Badan Kerjasama Pemuda Militer) di Gedung Wanita Jakarta. Gerwani juga mengajak para anggotanya untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawan dengan mengirimkan bantuan ke garis depan dan garis belakang. Pada tahun 1962 Gerwani juga turut bergabung ke dalam keanggotaan Front Nasional. Guna meningkatkan sumbangannya dalam perjuangan Irian Barat, DPP Gerwani membuka *Training Center* yang diikuti oleh kader-kader mereka. Setelah berakhirnya *Training Center*, 4 sukarelawan dikirim ke Irian Barat.

Kata Kunci: *Gerwani, Pembebasan, Irian Barat.*

### ***THE ROLE OF GERWANI IN LIBERATION OF WEST IRIAN 1950-1963***

#### ***Abstract***

*Indonesia Women's Movement Organization or well-known as Gerwani was the movement of women in Indonesia that founded in 1950. In the beginning, Gerwani was derived from Gerwis which stands for Gerakan Wanita Sedar. In the 1<sup>st</sup> Congress of Gerwis at Surabaya 1951 they had interested in West Irian's issue. This research aims to understand the role of Gerwani in West Irian liberation struggle 1950-1963. Since 1957, the politic of Gerwani was directed to West Irian's problem. On December, 22<sup>nd</sup> 1957, Gerwani participated in signing the Charter of BKSPM (Badan Kerjasama Pemuda Militer) at Gedung Wanita Jakarta. Gerwani also encouraged their members to register as the volunteer by sending help to the front lines and the rear. In 1962 Gerwani also merged into the membership of the Front Nasional. In order to increase their contributions to West Irian's struggle, Gerwani Center Leadership Council opened a training center for their cadres. After the end of the Training Center, 4 volunteers were sent to West Irian.*

*Keyword : Gerwani, Liberation, West Irian.*

#### **I. PENDAHULUAN**

Perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB)<sup>1</sup> pada tahun 1949 merupakan pertama kalinya masalah Irian Barat dibahas antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini menjadi awal pemicu permasalahan Irian Barat untuk beberapa tahun kedepannya. Perbedaan pandangan

dalam masalah Irian Barat menjadi faktor utama persetujuan kedua negara. Indonesia berpendapat bahwa wilayah kedaulatan Indonesia mencapai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, sedangkan Belanda mempunyai pandangan lain yaitu mencoba memberi status khusus yang terpisah dari bekas Hindia Belanda.

---

<sup>1</sup>M. Cholil, *Sedjarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat*, (Jakarta:

Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971), hlm. 5.

Sesuai dengan isi perjanjian KMB, pada tahun 1950 Indonesia berusaha mencari jalan keluar dalam permasalahan Irian Barat. Kemudian konferensi itu memutuskan dibentuknya Komisi Gabungan untuk penyelesaian masalah Irian Barat. Tugas utama Komisi Gabungan ini adalah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Irian Barat kemudian melakukan penyelidikan tentang kondisi penduduk dan kegiatan pemerintah Belanda di Irian Barat. Laporan dari komisi tersebut diserahkan pada bulan Agustus 1950. Walaupun demikian, masing-masing komisi dari kedua belah pihak membuat sendiri laporannya sehingga perbedaan ini memperuncing situasi. Pihak Indonesia mengajukan bahwa Indonesia-lah yang mempunyai alasan mengenai haknya atas Irian Barat. Tuntutan ini terutama lebih ditujukan untuk kepentingan penduduk Irian Barat sendiri, sedangkan kekuasaan Belanda atas wilayah tersebut merupakan kekuasaan kolonial yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan Belanda sendiri dan tidak untuk kepentingan rakyat Irian Barat.<sup>2</sup> Sedangkan Belanda menganggap Irian Barat berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya.

Selama lebih sepuluh tahun sejak tahun 1950 delapan kabinet RI secara berturut-turut dalam program kerjanya selalu mencantumkan masalah Irian Barat.<sup>3</sup> Berbagai jalur perundingan diplomasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mengembalikan Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia.<sup>4</sup> Indonesia juga gagal membawa masalah Irian Barat melalui PBB. Indonesia berusaha lebih keras dalam menanggapi masalah Irian Barat dengan

melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer.

Pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden, ini menjadi awal dimulainya Demokrasi Terpimpin menggantikan Demokrasi Liberal yang selalu gagal menyelesaikan masalah Irian Barat. Sebagai jawaban atas tidak kunjung selesainya masalah Irian Barat, pada tahun 1961 Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikorra) di Yogyakarta. Pengaruh politik Soekarno setelah Demokrasi Terpimpin semakin kuat, kekuasaan politik Soekarno hampir tidak memiliki batas. Politik Soekarno pada saat itu berfokus seputar masalah Irian Barat dan anti imperialisme. Soekarno mencoba menghimpun seluruh potensi nasionalnya termasuk dari kalangan organisasi. Kedekatan Gerwani sebagai sebuah organisasi dengan penguasa saat itu membuat Gerwani turut terlibat dalam pusran masalah Irian Barat.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.<sup>5</sup> Penggunaan kajian sejarah diharapkan dapat menambah referensi bagi penulis dalam menuliskan karyanya agar karya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kajian pustaka dapat digunakan untuk menelaah dan mengkaji pustaka sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa pustaka untuk menambah referensi dan informasi.

Topik pembahasan peneliti adalah Peranan Gerwani Dalam Pembebasan Irian Barat Tahun 1950-1963. Gerwani pada

Hiu Kencana Pada Saat Operasi Trikora Merebut Irian Jaya 1961-1963”, *E-Jurnal*, diakses dari <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>, hlm. 159.

<sup>5</sup>Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah, 2013), hlm. 6.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>3</sup>John Patiara, dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Irian Jaya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hlm. 78.

<sup>4</sup>Bima Tri Pradicta, “Peran Kapal Selam Pasopati 410 Dalam Satuan Korps

mulanya berasal dari Gerwis atau Gerakan Wanita Indonesia Sedar. Organisasi ini diprakarsai oleh S.K. Trimurti seorang tokoh wanita yang telah bertahun-tahun turut berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Gerwis merupakan fusi dari enam organisasi wanita pada tahun 1950. Pada tahun yang sama Gerwis kemudian mengadakan kongres untuk membentuk pengurus besar sementara Gerwis. Pada Desember 1951, Gerwis mengadakan kongres pertama mereka di Surabaya. Dalam kongres tersebut diputuskan bahwa Gerwis menolak imperialisme dengan segala bentuknya.<sup>6</sup> Dalam kongres juga diambil sebuah keputusan mengenai sikap Gerwis terhadap Irian Barat.

Setelah kongres Gerwis pertama, terlihat adanya orang-orang pro-PKI untuk mengkonsolidasikan pengaruh komunis dalam tubuh Gerwis. Ada tiga fokus utama Gerwis yaitu front politik, front feminisme dan front perjuangan. Pada tahun 1954 diadakan Kongres II Gerwis di Jakarta. Pada kongres ini terjadi perubahan nama dan bentuk organisasi dari Gerwis menjadi Gerwani. Organisasi ini kemudian berubah dari organisasi yang berorientasi kader menjadi organisasi berbasis massa luas. Perubahan tersebut kemudian sukses membesarkan jumlah anggota Gerwani kedepannya. Hasil Kongres II kemudian disebarluaskan dengan tujuan menarik massa seluas-luasnya dengan target anggota 1 juta pada tahun 1955.

Kongres III Gerwani pada tahun 1957 menunjukkan mereka semakin melibatkan diri dalam politik nasional. Peristiwa ini kemudian ditandai dengan dukungan Gerwani terhadap pidato Presiden Soekarno tentang "Konsepsi Presiden" pada 21 Februari 1957. Gagasan Soekarno adalah ingin membangun struktur pemerintahan yang baru. Sistem Demokrasi Parlementer

yang berlaku selama ini kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem itu harus diganti dengan sistem lain yaitu sistem Demokrasi Terpimpin.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, peristiwa ini menandai dimulainya Demokrasi Terpimpin. Setelah 1959 pengaruh politik hegemoni Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin mengikat kuat gerakan perempuan. Karena Gerwani menjadi organisasi perempuan paling dekat dengan Presiden, hal itu memberikan pengaruh cukup besar terhadap KWI/Kowani (Kongres Wanita Indonesia).<sup>7</sup> Kedekatan hubungan dengan penguasa saat itu, tentunya Gerwani harus menyesuaikan diri dengan arah politik penguasa saat itu. Kongres Gerwani III menunjukkan bahwa Gerwani semakin melibatkan diri dalam kancah politik nasional.<sup>8</sup>

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekamandan peninggalan masa lampau. Dalam penelitian ini, menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan yang digunakan dalam penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto antara lain: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan). Heuristik merupakan suatu kegiatan dengan mengumpulkan sumber sejarah sebanyak-banyaknya. Proses selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber sejarah. Pada tahap ini peneliti menelaah lebih jauh sumber tersebut untuk mendapatkan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. Dalam tahap ini terbagi menjadi dua macam yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menafsirkan fakta sejarah dalam sumber sejarah secara objektif. Dalam pencarian fakta sejarah ini terbagi menjadi dua

---

<sup>6</sup>Amurwani Dwi Lestariningsih, *op.cit*, hlm. 39.

<sup>7</sup>Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*,

(Yogyakarta: Galang Press, 2010), hlm. 200.

<sup>8</sup>Amurwani Dwi Lestariningsih, *op.cit*, hlm. 56.

cara yaitu dengan sintesis dan analisis. Terakhir adalah historiografi atau penulisan adalah suatu kegiatan dengan merekonstruksi peristiwa sejarah secara kronologis dan sistematis. Dalam tahap ini peneliti menggunakan model penulisan sejarah analitis, yaitu penulisan sejarah yang fokus pada pokok permasalahan.

Metode penelitian dalam studi sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis atau suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode sejarah kritis.

Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap pokok yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Heuristik adalah pengumpulan jejak sejarah yang terkait dengan bahan yang akan di tuliskan dalam penulisan sejarah. Tahap kedua yaitu kritik sumber merupakan langkah untuk mencari suatukeredibilitas (kebenaran), mencari ke otentisitas (aslian sumber). Tahap ketiga yaitu Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam langkah merekonstruksi realitas di masa lampau. Maka fakta-fakta sebagai bukti apa yang pernah terjadi di masa lalu diinterpretasi dengan mencari dan membuktikan relasinya yang satu dengan lainnya, sehingga membentuk satu rangkaian yang faktual dan logis dari peristiwa masa lampau. Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Setelah semua proses atau langkah dalam metode penelitian selesai maka dituangkan dalam bentuk tulisan.

#### IV. HASIL PENELITIAN

---

<sup>9</sup>Sedar merupakan kaum perempuan yang memiliki kesadaran akan politik. Lihat Amurwani Dwi Lestari, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>10</sup>Amurwani Dwi Lestariningsih, *Gerwani: KisahTapol Wanita di Kamp Plantungan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 35-36.

#### A. Awal Berdirinya Gerwani

Pada mulanya, Gerwani berasal dari Gerwis yang merupakan kependekan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar.<sup>9</sup> Gerwis berdiri pada tanggal 4 Juni 1950 yang diprakarsai oleh S.K Trimurti bersama beberapa pejuang wanita, terutama yang pernah melakukan gerilya pada Agresi Militer II.

Gerwis adalah fusi dari enam organisasi wanita, yaitu Rukun Puteri Indonesia (Rupindo) dari Semarang; Persatuan Wanita Sedar dari Bandung; Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya; Gerakan Wanita Indonesia Kediri (Gerwindo); Perjuangan Puteri Republik Indonesia dari Pasuruan; dan Persatuan Wanita Sedar dari Madura.<sup>10</sup>

Para anggota Gerwis berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda, banyak di antaranya dari keturunan priyayi rendah, tetapi mereka ikut terjun dalam gerakan nasional.<sup>11</sup> Banyak dari mereka yang ikut serta dalam perang gerilya melawan Jepang dan Belanda. Kaum perempuan yang tergabung dalam Gerwis mempunyai dasar pengertian serta keyakinan bahwa kaum perempuan harus sadar tentang politik serta kaum perempuan memiliki kepentingan dalam perjuangan anti penjajahan.

Adanya berbagai macam organisasi wanita dengan asas tujuan yang berbeda akan melemahkan pergerakan wanita. Dalam pertemuan tersebut juga diputuskan untuk mengajak organisasi wanita lainnya yang mempunyai asas dan tujuan yang sama dengan ketiga organisasi itu untuk berfusi. Tanggal 3-6 Juni 1950 diadakan kongres di

<sup>11</sup>Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, (Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2010), hlm. 215.

Semarang. Kongres itu menghasilkan sebuah pembentukan organisasi baru yaitu Gerakan Wanita Sedar (Gerwis).<sup>12</sup> Dalam kongres itu juga disusun pengurus besar sementara Gerwis, dipilih sebagai Ketua Tri Metty, Ketua II Umi Sardjono, Ketua III S.K Trimurti, dan Sekretaris Sri Koesnapsiyah.<sup>13</sup>

Gerwis didirikan atas dasar pengertian dan keyakinan bahwa wanita mempunyai kepentingan dalam perjuangan anti penjajahan yang bersifat imperialis dan kapitalis. Asas dari Gerwis adalah kekeluargaan dan persaudaraan yang sempurna dalam masyarakat, yang bersendikan atas dasar Pancasila. Menurut paham Gerwis, Pancasila yang sesungguhnya tidak dapat berkompromi dengan imperialis dan kapitalis. Gerwis mempunyai tujuan yaitu tercapainya masyarakat yang lepas dari perbudakan dan penindasan, antara orang dan orang, golongan dan golongan, bangsa dan bangsa, sehingga tercipta kekeluargaan yang sejati.

Setelah Gerwis berdiri, anggota-anggotanya dikerahkan ke daerah-daerah supaya turut serta menggerakkan rakyat untuk menuntut terbentuknya negara kesatuan. Pada awal berdirinya Gerwis hanya membuat program kerja yang sederhana yaitu membuat kaum perempuan sadar terhadap politik. Gerwis mendekati diri dengan kaum perempuan miskin dengan kegiatan utama seperti pertemuan-pertemuan rutin, ceramah, serta rapat, dan arisan. Di dirikannya 52 tempat kursus-kursus keterampilan dan kursus pemberantasan buta huruf, 29 kursus penyandang cacat, dan 17 tempat kursus bagi kader-kader, serta didirikannya sekolah taman kanak-kanak (TK Melati).<sup>14</sup>

Gerwis mulai berkembang dengan pesat. Pada pertengahan tahun 1951, Gerwis yang masih menjadi organisasi

muda sibuk membenahi diri dan membangun cabang-cabang di seluruh Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Perkembangan selanjutnya, beberapa organisasi massa menyatakan diri bergabung dengan Gerwis. Pada tahun 1952, organisasi Istri buruh Kereta Api (IBKA) menyatakan diri bergabung dengan Gerwis kemudian diikuti oleh organisasi Persatuan Wanita Indonesia dari Manado (Perwin) yang bergabung dengan Gerwis tahun 1953. Tertariknya beberapa organisasi bergabung dengan Gerwis karena mereka melihat oleh perjuangan yang dilakukan Gerwis demi kepentingan rakyat kecil terutama kaum perempuan.

Dalam Kongres II Gerwis yang dilaksanakan pada tahun 1954 terjadi perubahan nama Gerwis menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang telah disepakati pada Kongres I. Perubahan nama ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan 'karakteristik sempit' dari Gerwis.<sup>15</sup> Nama Gerwis itu sendiri Gerakan Wanita Indonesia Sedar yang berarti keanggotaannya terbatas. Hanya kaum wanita yang telah sadar diterima sebagai anggota, sementara jutaan kaum wanita dari massa luas belum mencapai kesadaran dan harus diajak ikut serta dalam perjuangan.

Umi Sardjono terpilih sebagai Ketua Gerwani. Dalam susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat yang baru ditunjuk Suharti sebagai Wakil Ketua I, Ny. Mudigdio sebagai Wakil Ketua II, Asiyah dan Darmini ditunjuk sebagai Sekretaris. Keanggotaannya dipilih Kartinah, Mawarni, Paryani, dan Suwarti. S.K Trimurti pada Kongres II sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan melainkan

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Amurwani Dwi Lestariningsih, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>14</sup>Fransisca Ria Susanti, *Kembang-Kembang Gender*, (Yogyakarta: Jejak Wangun Pritinka, 2007), hlm. 135-138.

<sup>15</sup>Hikmah Diniah, *op.cit.*, hlm. 97.

sebagai anggota pleno biasa yang terdiri atas 35 anggota.<sup>16</sup>

Sejak saat itulah Gerwani resmi menjadi organisasi wanita yang berorientasi pada penggalangan massa seluas-luasnya dan berjuang demi hak-hak wanita dan anak-anak. Salah satu dokumen penting yang dihasilkan dalam Kongres II adalah tujuan dan tugas Gerwani. Tujuan dan tugas Gerwani memuat petunjuk tentang cara-cara kaum wanita mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin tinggi dan hak-hak kaum wanita.

Dalam anggaran dasarnya, Gerwani sebagai organisasi massa menyatakan bahwa Gerwani adalah organisasi wanita yang bergerak dalam bidang pendidikan dan perjuangan yang tidak menjadi bagian dari partai politik apa pun.<sup>17</sup> Berkaitan dengan keanggotaan, dinyatakan bahwa anggota Gerwani terbuka untuk semua wanita Indonesia yang berusia 16 tahun atau lebih. Mengingat banyaknya kaum wanita yang masih buta huruf, untuk menjadi anggota Gerwani tidak diperlukan tanda tangan atau mengisi formulir. Gerwani juga membolehkan adanya keanggotaan rangkap.

Kongres II Gerwis bertemakan hak-hak perempuan dan anak-anak, kemerdekaan, serta perdamaian. Kongres ini menghasilkan lima program mendesak yaitu; pengesahan undang-undang perkawinan untuk seluruh Indonesia dan menjamin kesetaraan antara wanita dan laki-laki, meningkatkan dana untuk kesehatan sosial juga meningkatkan pelayanan sosial dan kesejahteraan kaum perempuan dan anak-anak, meningkatkan jumlah sekolah negeri dan usaha

memberantas buta huruf, memperluas tindakan sosial untuk melindungi perempuan buruh di pabrik, dan kewajiban pemerintah untuk ikut serta melaksanakan hukum internasional.<sup>18</sup>

Hasil Kongres II kemudian disebarluaskan dengan tujuan utama meraih massa seluas-luasnya, dengan target keanggotaan yang dicapai pada akhir 1955 sebesar 1 juta orang.<sup>19</sup> Dalam perekrutan anggotanya, Gerwani melatih kader-kadernya untuk terjun langsung ke masyarakat dan mempelajari budaya dan kondisi masyarakat. Cara tersebut berhasil menarik perhatian massa. Setiap informasi tentang kondisi dan budaya masyarakat setempat, para kader Gerwani kemudian menyusun program kerjanya. Isu utama yang digunakan untuk menjaring massa adalah masalah yang berkaitan dengan rumah tangga dan perkawinan, serta masalah yang berkaitan dengan isu pemberantasan buta huruf.

Dalam bidang politik, Gerwani memiliki langkah yang tidak menentu. Disatu sisi Gerwani berusaha untuk mencapai sebuah kesetaraan dengan laki-laki namun disisi lain Gerwani menggunakan cara tradisional dari sisi perempuan ketika memasuki arena perpolitikan. Sebagai organisasi wanita yang sudah sadar politik, Gerwani tentu sadar mereka harus masuk ke dalam pemerintahan dan mengambil langkah nyata di dalamnya.

Dalam pemilu tahun 1955, enam orang anggota Gerwani berhasil terpilih untuk menduduki parlemen mewakili PKI.<sup>20</sup> Mereka adalah Suharti Suwanto, Ny. Mudigdio, Salawati Daud, Suwardiningsih,

(Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm.191.

<sup>19</sup>Harian Rakyat, 22 Juni 1956.

<sup>20</sup>Saskia E. Wieringa, *Kuntilanak Wangi, Organisasi-Organisasi Perempuan di Indonesia sesudah 1950*. (Jakarta: Kalyanamitra, 1998), hlm. 19.

<sup>16</sup>Amurwani Dwi Lestariningsih, *op.cit.*, hlm., 44.

<sup>17</sup>Amurwani Dwi Lestariningsih, *op.cit.*, hlm. 53.

<sup>18</sup>Cora Struers, *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan & Pencapaian*.

Maemunah, dan Umi Sardjono.<sup>21</sup> Dalam pemilihan anggota MPR, anggota Gerwani lebih banyak lagi yang terpilih pada daftar PKI. Mereka adalah Ny. Amir Syarifuddin, Ny. D.D. Susanto, Suwardiningsih, Setiati Surasto, Suwarti, Maemunah, Sundari, dan Nuraini.

## **B. Gerwani dalam Upaya Pembebasan Irian Barat 1950-1963**

Permasalahan Irian Barat merupakan masalah yang mana menurut persetujuan awal akan diselesaikan oleh Indonesia dan Belanda satu tahun setelah persetujuan KMB di Den Haag. Akan tetapi, setelah lebih dari satu tahun, Belanda tidak menepati isi persetujuan tersebut dan tidak pernah mengakui secara *de jure* wilayah Irian Barat adalah wilayah Indonesia.

Beragam diplomasi sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Sesuai dengan isi perjanjian KMB, permasalahan Irian Barat akan dibicarakan dalam jangka waktu satu tahun. Pada tanggal 25 Maret 1950 sampai dengan 1 April 1950, dilakukan perundingan pertama untuk pemecahan masalah Irian Barat.<sup>22</sup> Dalam perundingan itu diputuskan untuk membentuk Komisi Gabungan. Komisi Gabungan ini bertugas untuk melakukan peninjauan langsung ke Irian Barat dan diharapkan memberi laporan 3 bulan setelahnya. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah Irian Barat.

Laporan Komisi Gabungan yang masuk pada bulan Agustus 1950 telah mencerminkan perbedaan pendapat kedua belah pihak tidak memiliki pendekatan sama sekali.<sup>23</sup> Pada tanggal 4 November 1950, dalam konferensi Uni Indonesia Belanda, pihak Indonesia mengajukan kepada Belanda untuk mengakui secara *de jure* wilayah Irian Barat sebagai wilayah Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut

ditolak mentah-mentah oleh pihak Belanda karena mereka beranggapan secara wilayah dan penduduk, Irian Barat serta masyarakat yang tinggal di Irian Barat bukanlah bagian dari Indonesia.

Pada tanggal 4 Desember 1950 diadakan perundingan di Den Haag, akan tetapi perundingan ini menemukan jalan buntu. Pada tahun 1954 persoalan Irian Barat dibawa oleh Pemerintah Indonesia ke sidang Majelis Umum PBB. Pemerintah Indonesia kemudian masih mengusahakan pemecahan masalah Irian Barat melalui perundingan antar kedua negara. Usaha untuk perundingan dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Belanda di Indonesia pada September 1952. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih tetap menemui jalan buntu.

Semenjak kegagalan masalah Irian Barat dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia kemudian memulai langkah tegas dengan melakukan Konfrontasi baik secara Politik maupun Ekonomi. Pemerintah Indonesia berusaha memperjuangkan masalah Irian Barat melalui diplomasi tingkat internasional, seperti yang dilakukan oleh Presiden Sukarno pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1954.

Reaksi keras yang ditujukan kepada kolonialisme Belanda di Irian Barat datang dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi wanita seperti Gerwani. Semenjak masih bernama Gerwis, Organisasi mereka juga memperhatikan masalah tentang Irian Barat. Dalam Kongres Gerwis<sup>24</sup> I di Surabaya pada tahun 1951, Gerwis telah menyinggung masalah Irian Barat dan memasukkan Irian Barat dalam keputusan Kongres. Gerwis memasukan perjuangan anti kolonialisme Belanda di Irian Barat dalam keputusan kongres pertama mereka.

Pergerakan wanita terhadap permasalahan Irian Barat sebenarnya bukan

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

<sup>22</sup>M. Cholil, *op.cit.*, hlm.6.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm.7.

<sup>24</sup>Sebelum merubah nama menjadi Gerwani.

hanya ada pada Gerwani saja. Dalam Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 di Palembang tahun 1955, permasalahan Irian Barat juga telah mencuri perhatian pergerakan wanita di Indonesia dan mengirim pernyataan kepada Menteri Luar Negeri mendukung penuh usaha pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Pada Kongres Gerwani ke-3 di Surakarta tahun 1957, Gerwani juga mengeluarkan Resolusi tentang pembebasan Irian Barat. Gerwani dan beberapa organisasi wanita lain juga turut bekerja sama dengan BKSPM (Badan Kerjasama Pemuda Militer). Pada tanggal 22 Desember 1957 ditandatangani sebuah Piagam kerjasama dengan BKSPM. BKSPM sendiri diresmikan oleh KSAD Jenderal A.H. Nasution pada 17 Juni 1957. Badan ini dibentuk karena keadaan negara yang dinilai dalam bahaya. Ada 4 Organisasi pemuda yang dilibatkan: Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pemuda Ansor, Pemuda Demokrat dan Pemuda Rakyat.<sup>26</sup>

Pengurus pusat Gerwani pada tahun 1960 kemudian mengeluarkan pernyataan atas nama 710.000 anggota mereka siap berjuang melawan Belanda. Gerwani meminta kepada pemerintah agar menyita modal Belanda yang tersembunyi dalam perusahaan campuran dan menghentikan pembayaran ganti rugi perusahaan yang dinasionalisasi.<sup>27</sup> Dukungan kepada pemerintah tentang Irian Barat juga terlihat dari majalah Api Kartini yang merupakan majalah besutan Gerwani. Dari tahun 1960-an majalah ini kemudian dipenuhi dengan Irian Barat dan Trikora. Beberapa kali Gerwani melakukan aksi demonstrasi menentang imperialisme Belanda di Irian Barat.

DPP Gerwani berpendapat bahwa mereka harus terus memperluas peran politik perempuan di Indonesia. Keterlibatan Gerwani dalam masalah nasional seperti Irian Barat tidak lepas dari ketertarikan mereka terhadap politik nasional. Isu-isu seperti Irian Barat mendapat tempat prioritas yang sangat tinggi dalam organisasi Gerwani. Pada sidang pleno DPP Gerwani pada April 1961 mencatatkan sejumlah kesuksesan di beberapa bidang. Salah satu kesuksesan Gerwani adalah membangun Front Persatuan Wanita serta memenuhi tugas dalam perjuangan Irian Barat.

Pengurus pusat Gerwani pada tahun 1960 kemudian mengeluarkan pernyataan atas nama 710.000 anggota mereka siap berjuang melawan Belanda. Gerwani meminta kepada pemerintah agar menyita modal Belanda yang tersembunyi dalam perusahaan campuran dan menghentikan pembayaran ganti rugi perusahaan yang dinasionalisasi.<sup>28</sup> Dukungan kepada pemerintah tentang Irian Barat juga terlihat dari majalah Api Kartini yang merupakan majalah besutan Gerwani. Dari tahun 1960-an majalah ini kemudian dipenuhi dengan Irian Barat dan Trikora. Beberapa kali Gerwani melakukan aksi demonstrasi menentang imperialisme Belanda di Irian Barat.

DPP Gerwani berpendapat bahwa mereka harus terus memperluas peran politik perempuan di Indonesia. Keterlibatan Gerwani dalam masalah nasional seperti Irian Barat tidak lepas dari ketertarikan mereka terhadap politik nasional. Isu-isu seperti Irian Barat mendapat tempat prioritas yang sangat tinggi dalam organisasi Gerwani. Pada sidang pleno DPP Gerwani pada April 1961 mencatatkan sejumlah kesuksesan di beberapa bidang. Salah satu kesuksesan

---

<sup>25</sup>Kowani, *op.cit.*, hlm. 131.

<sup>26</sup>Philips Tangdilintin, *Pembinaan Generasi Muda*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 47.

<sup>27</sup>Harian Rakyat, 16 Mei 1960.

<sup>28</sup>Harian Rakyat, 16 Mei 1960.

Gerwani adalah membangun Front Persatuan Wanita serta memenuhi tugas dalam perjuangan Irian Barat.

Sejak tahun 1962, politik Gerwani banyak diarahkan ke masalah Irian Barat. Gerwani mengajak kaum wanita muda untuk berpartisipasi dalam kampanye nasional pembebasan Irian Barat. Gerwani kemudian terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi menentang kolonialisme Belanda di Irian Barat. Berdasarkan rapat kerja aktivitas Gerwani yang diadakan pada September 1962, para anggota Gerwani diminta mendaftarkan diri sebagai sukarelawati untuk pembebasan Irian Barat dengan mengirimkan bantuan ke garis depan dan membantu keluarga sukarelawati di garis belakang.<sup>29</sup> Dukungan politik Gerwani terhadap PKI dan Soekarno, dalam pengertian telah dicapainya masyarakat sosialis di bidang hak-hak perempuan, terus dilakukan.

### C. Gerwani Pasca Pembebasan Irian Barat

Gugusan pulau Irian Barat pada masa-masa akhir tahun 1961 masih dikuasai Belanda, terletak di ujung timur dari rangkaian kepulauan Indonesia. Pada tanggal 26 Mei 1962 tampilah suatu konsep perdamaian, terkenal dengan Usul Ellsworth Bunker yang diumumkan oleh pejabat Sekretaris Jendral PBB, U Thant. Isi pokok Usul Bunker ialah rencana penyerahan administrasi pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia melalui suatu Badan Pemerintahan PBB dan menjamin adanya hak menentukan pendapat bagi masyarakat Irian Barat, sebagai usaha

pendekatan antara dua pihak yang bersengketa.<sup>30</sup>

Tanggapan Pemerintah Indonesia atas Usul Bunker dapat diterima karena memuat pasal tentang penyerahan administrasi pemerintahan Irian Barat ke Republik Indonesia. Akan tetapi pihak Pemerintah Belanda belum juga memberikan tanggapan positif, ketidakpastian Pemerintah Belanda berhubungan erat dengan perkembangan situasi pendaratan dan pertempuran yang terjadi di Irian Barat, meskipun kekuatan pasukan Indonesia semakin menguasai keadaan pada daerah-daerah kantong gerilya.

Belanda masih berharap dapat mempertahankan sebagian besar daerah kedudukan yang masih dikuasainya, dengan semua kekuatan yang tersedia akan memukul mundur dan menghancurkan pasukan Indonesia dan dengan demikian kekuasaan Belanda tetap berlangsung dan mendorongnya untuk menolak saja Usul Bunker.<sup>31</sup>

Pemerintah Indonesia menganggap bahwa pendaratan pasukan Indonesia merupakan jawaban atas sikap Belanda yang selama 10 tahun terakhir selalu merintangai usaha-usaha damai yang telah ditempuhnya. Pendaratan dan penerjunan akan terus dilanjutkan sampai Belanda mau merubah sikap untuk bersedia berunding atas dasar Usul Bunker.

Penghentian permusuhan antara Indonesia dan Belanda dimulai pukul 00.01 GMT pada hari Sabtu 18 Agustus 1962.<sup>32</sup> Bendera Belanda di Irian Barat diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962, merupakan lambang resmi berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat. Pada saat

---

<sup>29</sup>Lihat Lampiran 6, ANRI, Front Nasional No. 724, *Rapat kerja Gerwani Jakarta dalam mendukung Amanat Presiden tahun 1962*.

<sup>30</sup>Muhammad Cholil, *Sejarah Operasi Operasi Pembebasan Irian Barat*, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1979), hlm. 92.

<sup>31</sup>Baharuddin Lopa, *op.cit.*, hlm. 126.

<sup>32</sup>Jayanti Purnamawati, "Peran TNI-AD dalam Operasi Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1963", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2010), hlm. 106.

yang sama itu pula bendera Indonesia dikibarkan sebagai pengganti bendera Belanda sekaligus melambangkan dimulainya kekuasaan *de jure* RI di Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Setelah perjanjian New York, Belanda secara resmi menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan sementara PBB. Pemerintahan sementara PBB hanya berjalan selama kurang dari satu tahun yang kemudian pemerintahan di Irian Barat diserahkan sepenuhnya kepada Indonesia.<sup>33</sup>

Usaha dan peran organisasi Gerwani untuk dapat mempengaruhi gerakan perempuan lainnya dilandasi oleh tiga tujuan yang saling terkait: pertama, organisasi Gerwani ingin memimpin gerakan yang lebih luas. Organisasi Gerwani yakin sikap pengutamaannya pada kepentingan perempuan Indonesia merupakan pendirian yang benar. Kedua, Gerwani ingin menjadi gerakan massa. Ketiga, Gerwani menghendaki agar gerakan perempuan memainkan peranannya dalam politik nasional.<sup>34</sup>

Kemunculan Trikora memaksa Gerwani berperan didalamnya. Mereka berusaha mendaftarkan kaum perempuan muda dalam rangka kampanye nasional untuk pembebasan Irian Barat. Gerwani menjadi pendukung utama manuver politik Presiden Soekarno dengan membuktikan kepada Presiden Soekarno, bahwa organisasi Gerwani bukanlah suatu gerakan perempuan '*nDoro Den Ayu*' seperti yang diistilahkan Presiden Soekarno saat Kongres IV Gerwani. Pimpinan Gerwani merasa langkahnya untuk mendaftar kaum perempuan itu tidak lain untuk memperluas areal peranan sosial dan politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak sekedar sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi berperan sebagai pejuang.<sup>35</sup>

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 23.

<sup>34</sup>Saskia Eleonora Wieringa, *op.cit.*, hlm. 318.

<sup>35</sup>Elisabeth Endah Retnoningrum, "Pengaruh Citra Gerwani Terhadap

Keterlibatan Gerwani dalam Trikora memiliki dampak yang luas bagi pergerakan perempuan di Indonesia. Gerwani memiliki posisi yang unik dalam sejarah pergerakan perempuan Indonesia. Mereka adalah golongan feminisme, nasionalisme, dan sosialisme. Gerwani dapat dipandang sebagai organisasi perempuan semi-otonom dengan tiga alur kesetiaan, kepada kaum perempuan, kepada tujuan sosialis, dan nasionalis.<sup>36</sup> Kegiatan utama Gerwani dari tahun 1962 sampai tahun kejatuhan mereka kebanyakan didominasi oleh masalah politik nasional, walaupun isu feminisme tidak dihilangkan. Keterlibatan mereka dalam Trikora mampu mengubah pandangan tentang pergerakan kaum perempuan di Indonesia yang tidak lagi hanya sebatas masalah feminisme dan kesetaraan hak dan gender dengan kaum pria tapi mereka mampu menunjukkan taji dalam pentas politik nasional yang didominasi oleh kaum pria.

Gerwani meyakini jika kaum perempuan mengambil langkah dan berperan lebih militan dan gagah berani demi kehormatan nasional dan tidak ketinggalan dari perjuangan umum, maka laki-laki tidak akan terus mengingkari hak-hak formal perempuan. Dengan semangat tinggi dari kaum perempuan di masa Trikora ini tidak akan ada seorang pun yang mengatakan perempuan hanya berperan dalam mengasuh anak saja. Desakan terhadap kebutuhan sukarelawati untuk pembebasan Irian Barat kemudian mendorong Gerwani membentuk gerakan sukarelawati mereka sendiri. Gerwani kemudian mendaftarkan kaum wanita muda sebagai sukarelawati. Mereka diseleksi dari setiap cabang Gerwani. Wanita-wanita yang tergabung dalam anggota Gerwani

Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009), hlm. 50.

<sup>36</sup>Saskia E. Wieringa, *op. cit.*, hlm.80.

atas persetujuan Kongres Wanita Indonesia dilatih kemiliteran.<sup>37</sup>

Pengaruh lainnya adalah kenyataan bahwa para pemimpin Gerwani semua ikut ambil bagian dalam perjuangan pembebasan nasional tahun 1945-1950, dan semuanya tokoh nasionalis militan.<sup>38</sup> Dalam periode 1959-1965 Gerwani melakukan aksi-aksi anti-imperialis. Aksi tersebut ditujukan pada imperialisme Belanda selama perjuangan Trikora untuk membebaskan Irian Barat, selanjutnya selama Dwikora terhadap Inggris dalam Konfrontasi Malaysia. Dalam mendukung nasionalisasi perusahaan minyak Inggris Caltex, Gerwani melakukan aksi boikot bersama.<sup>39</sup>

Dengan menerima Trikora, Gerwani kemudian dituntut untuk mengubah ideologi yang semula menjunjung prinsip-prinsip perdamaian tanpa syarat kemudian menerima perang dengan hati-hati. Hal ini diperlukan untuk melandasi keinginan Gerwani untuk menyediakan sukarelawati yang akan dilatih dan dikirim ke Irian Barat. Gerwani menyerukan mobilisasi membebaskan Irian Barat. dalam hal ini Gerwani menggunakan pandangan pasifis Bertha von Suttner dalam bukunya *Die Waffen Nieder* untuk menjelaskan dengan rinci sikap baru Gerwani tentang perdamaian.<sup>40</sup>

Perdamaian dunia merupakan tempo kGerwanisepanjang tahun 1950-an. Dalam peringatan hari perempuan sedunia pada 8 Maret 1955, Gerwanimenghendaki adanyaperdamaian dunia sertamengecam perang dan percobaansenjatanuklir. Daritahun 1960terjadiperubahanpandangan tentang perdamaian dan sikap antiperang dari Gerwani. Terjadipergeseransikap Gerwaniterhadap isu-isuperdamaian yang menjadipokok perhatian Gerwani sebelumnya. Pergeseran sikap tersebut tergambar jelas lewat sebuah pernyataan

Gerwanibahwatidak semua perang itu jahat.

Dalam pandangan Gerwani, disebutkan bahwa tidak semua perang yang harus dikecam, hanya perang yang berlandaskan imperialisme dan kolonialisme saja yang harus dikecam. Sedangkan perang yang bertujuan untuk membebaskan diri sendiri dari cengkraman kolonialisme dapat dibenarkan. Demikian halnya dengan Trikora yang harus didukung oleh kekuatan progresif dan cinta damai. Semua itu sebagai alasan pembenaran tentang militansi dan desakan terhadap latihan sukarelawati.

Perubahan pandangan tentang perdamaian menciptakan perselisihan antara Gerwani dan *Women Internasional Democratic Federation* (WIDF). Kedekatan Gerwani dengan WIDF sudah ada semenjak Gerwani masih bernama Gerwis. Gerwis bergabung dengan WIDF pada tahun 1950 dan menjadi saluran politik internasional paling penting Gerwani. Sejak tahun 1951, Gerwani telah mempunyai seorang wakil di *WIDF Council*. Selama dekade pertama keanggotaan Gerwani, hubungan itu saling mendukung dan Gerwani banyak mengambil manfaat.

Tetapi semenjak tahun 1960-an hubungan Gerwani dengan WIDF mulai menjadi renggang akibat semakin meningkatnya militansi Gerwani. Pada kongres WIDF bulan Juni 1963, timbul pertentangan antara WIDF dan Gerwani. Mayoritas kelompok di dalam WIDF menghendaki organisasi dalam garis "feminisme dan pasifis". Sedangkan Gerwani dengan kelompok yang berlawanan memiliki pandangan lain tentang perdamaian. Mereka beranggapan bahwa perdamaian tidak bisa dicapai selama masih ada imperialisme.

#### D. KESIMPULAN

<sup>37</sup>Amurwani Dwi Lestariningsih, *op. Cit*, hlm. 63.

<sup>38</sup>Saskia E. Wieringa, *op. cit*, hlm. 267.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 268.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 323.

Gerwani berasal dari Gerwis yang merupakan kependekan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar. Gerwis diprakarsai oleh S.K Trimurti bersama beberapa pejuang wanita. Para anggota Gerwis berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda, banyak diantaranya dari keturunan priyayi rendah, tetapi mereka ikut terjun dalam gerakan nasional. Gerwis mempunyai tujuan yaitu tercapainya masyarakat yang lepas dari perbudakan dan penindasan, antara orang dan orang, golongan dan golongan, bangsa dan bangsa, sehingga tercipta kekeluargaan yang sejati. Dalam Kongres II Gerwis yang dilaksanakan pada tahun 1954 terjadi perubahan nama Gerwis menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Sejak tahun 1962, politik Gerwani banyak diarahkan ke masalah Irian Barat. Gerwani mengajak kaum wanita muda untuk berpartisipasi dalam kampanye nasional pembebasan Irian Barat. Gerwani kemudian terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi menentang kolonialisme Belanda di Irian Barat. Gerwani juga mendukung politik Soekarno mengenai Irian Barat. Berdasarkan rapat kerja aktivitas Gerwani yang diadakan pada September 1962, para anggota Gerwani diminta mendaftarkan diri sebagai sukarelawati untuk pembebasan Irian Barat dengan mengirimkan bantuan ke garis depan dan membantu keluarga sukarelawati di garis belakang, serta membuka *training center*. Selain itu, beberapa anggota Gerwani juga turut bergabung dalam Front Nasional untuk dikirim ke Irian Barat.

Sejak terlibat dalam permasalahan Trikora, Gerwani menjadi pendukung utama manuver politik Presiden Soekarno dengan membuktikan kepada Presiden Soekarno, bahwa organisasi Gerwani bukanlah suatu gerakan perempuan 'nyonya besar'. Pimpinan Gerwani merasa langkahnya untuk mendaftar kaum perempuan itu tidak lain untuk memperluas

areal peranan sosial dan politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak sekedar sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi berperan sebagai pejuang. Gerwani meyakini, jika kaum perempuan mengambil langkah dan berperan lebih militan dan gagah berani demi kehormatan nasional dan tidak ketinggalan dari perjuangan umum, maka laki-laki tidak akan terus mengingkari hak-hak formal perempuan. Dengan semangat tinggi dari kaum perempuan di masa Trikora ini tidak akan ada seorang pun yang mengatakan perempuan hanya berperan dalam mengasuh anak saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip.

ANRI, Front Nasional No. 115 berisi tentang Tri Komando Rakyat tahun 1961.

ANRI, Front Nasional No. 126 berisi tentang kesimpulan Musyawarah Wanita Pengurus Besar Front Nasional tahun 1962.

ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 185 berisi Piagam BKS-PM-WANITA tanggal 22 Desember 1957.

ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 186 berisi tentang Dewan Perancang Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 707 berisi tentang pernyataan bergabungnya Gerwani kedalam Front Nasional dan penyerahan daftar sukarelawati pada tahun 1962.

ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 711 berisi tentang artikel Sejarah lahirnya Gerwani.

ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 713 berisi Seruan DPD Gerwani untuk Mendaftarkan Diri Memenuhi Trikora tanggal 10 Januari 1962.

- ANRI, Front Nasional No. 724 berisi tentang rapat kerja Gerwani Jakarta dalam mendukung Amanat Presiden tahun 1962.
- ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 727 berisi Surat DPD Gerwani Jakarta Raya untuk Mengikuti dan Mengirimkan Sumbangan Garam untuk Keperluan Dapur *Training Center* Kader dalam Rangka Perjuangan Irian Barat tanggal 30 September 1962
- ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 730 berisi Laporan Seminar Nasional oleh Wakil Sekjen II D.N. Pemuda Rakyat.
- ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 733 berisi Aktivitas Gerwani Jakarta Raya Tahun 1960-1962.
- ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 736 berisi Laporan Umum DPD Gerwani pada Koferensi Gerwani Mengenai “Dengan Semangat Trikora Membajakan Organisasi dan Mengatasi Segala Kesulitan tanggal 14 Desember 1962.
- Buku dan Jurnal.**
- Adang S., *Operasi Trikora*, Jakarta: Rosda Jayaputra, 1985.
- Amin S. M., *Indonesia di Bawah Demokrasi terpimpin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Amurwani Dwi Lestariningsih, *Gerwani:Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*, Jakarta: Kompas, 2011.
- Baharuddin Lopa, *Djalannja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*, Jakarta: Daya Upaya, 1962.
- Bima Tri Pradicta, “Peran Kapal Selam Pasopati 410 Dalam Satuan Korps Hiu Kencana Pada Saat Operasi Trikora Merebut Irian Jaya 1961-1963”, *E-Jurnal*, diakses dari <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>.
- Catharina Nanik Purwoko, *Perempuan dan Ketidakadilan*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial dan Jaringan Mitra Perempuan, 1996.
- Cora Struers, *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan & Pencapaian*, Depok: Komunitas Bambu, 2008.
- Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012.
- Fransisca Ria Susanti, *Kembang-Kembang Gender*, Yogyakarta: Jejak Wangun Pritinka, 2007.
- Geoffrey Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2006.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan BerparadigmaGanda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hans Joachim Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*, Yogyakarta: Carasvati Books, 2007.
- John Patiara, dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Irian Jaya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Kowani, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Bentang Budaya, 1995.
- Mabes TNI, *Trikomando Rakyat “Pembebasan Irian Barat”*, Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi Abri, 1995.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Mochammad Yamin, *Kedaulatan Indonesia atas Irian Barat*, Bukittinggi, 1956.

Muhammad Cholil, *Sedjarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat*, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.

Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982.

\_\_\_\_\_, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, Yogyakarta: Galang Press, 2010.

\_\_\_\_\_, *Kuntulanak Wangi, Organisasi-Organisasi Perempuan di Indonesia sesudah 1950*. Jakarta: Kalyanamitra, 1998.

Soebagijo I.N, S.K Trimurti, *Wanita Pengabdian Bangsa*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Subandrio, dkk, *Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat*, Jakarta: Yayasan Kepada Bangsa, 2000.

Sulami, *Perempuan-Kebenaran dan Penjara*, Jakarta: Cipta Lestari, 1999.

Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Tim Pusjarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid III*, Jakarta: Pusjarah TNI, 2009.

*Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi*, Surabaya: Percetakan Negara, 1963.

Umi Sarjono, *Madju Terus Untuk Pengintegrasian Total Gerwani dengan Wanita Buruh dan Tanimiskin*, Jakarta: Stensilan, 1964.

“KNIP”, <http://ejournal.undip.ac.id>, diakses pada 3 September 2018, pukul 18:22 WIB.

### Surat Kabar.

Bintang Timur, 19 Januari 1962.

Bintang Timur, 22 Januari 1962

Bintang Timur, 26 Januari 1962

Bintang Timur, 27 Januari 1962

Bintang Timur, 31 Juli 1962

Bintang Timur, 3 September 1962

Harian Rakyat, 7 November 1952

Harian Rakyat, 17 September 1958

Harian Rakyat, 17 Maret 1959

Harian Rakyat, 30 Januari 1960

Harian Rakyat, 16 Mei 1960.

Harian Rakyat, 15 Desember 1961

Harian Rakyat, 17 Agustus 1962

Harian Rakyat, 29 September 1962

Harian Rakyat, 23 Oktober 1962

Harian Rakyat, 25 Oktober 1962

Harian Rakyat, 29 Oktober 1962

Harian Rakyat, 2 November 1962

Harian Rakyat, 11 Desember 1963

### Skripsi.

Dian Astrid Widjaya, “Ibu Militan, Setan Perempuan Komunis dan Kembalinya Para Srikandi: Citra Gerwani Dalam Tiga Rezim”, *Skripsi*, Yogyakarta: UGM, 2010.

Elisabeth Endah Retnoningrum, “Pengaruh Citra Gerwani Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009.

Ismi Yulianti, “Wanita Kiri dalam Organisasi dan Stigma (Gerwani di Klaten 1954-1979)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UGM, 2011.

Jayanti Purnamawati, “Peran TNI-AD dalam Operasi Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1963”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2010.

### Internet.

[www.sejarahbali.com](http://www.sejarahbali.com) diakses pada 18 September 2018, pukul 14:52 WIB.

### BIODATA

Nama : Dimas Dwi Kurnia  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 31 Juli 1995

